



Jurnal Online Program Studi Pendidikan Ekonomi

ISSN-e 2502-275X

Vol. 8, No. 2, Mei 2023, Hal: 296-306, Doi: <https://doi.org/10.36709/jopspe>

Available Online at <https://jopspe.uho.ac.id/>

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DI DESA SINAULU JAYA

Rahmawati ^{1)*}, Murni Nia ²⁾, Hasniah ³⁾

Program Studi/Jurusan Pendidikan Ekonomi, Universitas Halu Oleo, Alamat Jln. H.E.A Mokodompit Kampus Hijau Bumi Tridharma Anduonohu, Kota Kendari, Indonesia.

Abstrak

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Sinaulu Jaya Kecamatan Wawonii Tenggara Kabupaten Konawe Kepulauan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akuntabilitas yang dilakukan oleh badan usaha milik desa di desa sinaulu jaya pada tahap perencanaan dan tahap pelaksanaan. Dalam penelitian ini, peneliti hanya berfokus pada tahun 2018 karena dana yang masuk cukup besar, tentunya dibutuhkan pengelolaan yang baik penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yaitu mendeskripsikan dan menguraikan fakta penelitian dan observasi yang menggambarkan kondisi empiris pada objek hasil penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan bumdes pada tahap perencanaan dan pelaksanaan sudah akuntabel. Saran penulis Penyebaran informasi yang diberikan bumdes diharapkan dapat lebih ditingkatkan dengan membuat beberapa papan informasi yang mudah diakses masyarakat agar dapat lebih memberikan manfaat kepada masyarakat. Pemerintah desa dan pengurus BUMDES diharapkan meningkatkan hubungan kerjasama agar lebih mempermudah dan membantu dalam proses pengembangan BUMDES.

Kata kunci: Akuntabilitas, Pengelolaan Keuangan BUMDES

Abstract

Accountability of Financial Management of Village-Owned Enterprises (BUMDES) in Sinaulu Jaya Village, Southeast Wawonii District, Konawe Islands Regency. This study aims to determine the accountability carried out by village-owned enterprises in Sinaulu Jaya village at the planning stage and implementation stage. In this study, researchers only focused on 2018 because the incoming funds were quite large, of course, good management was needed. This research uses a descriptive method with a qualitative approach, namely describing and describing research facts and observations that describe the empirical conditions on the object of the research results. The results of this study indicate that the accountability of bumdes financial management at the planning and implementation stages is accountable. The author's suggestion The dissemination of information provided by BUMDES is expected to be further improved by making several information boards that are easily accessible to the community so that they can provide more benefits to the community. Village government and BUMDES administrators are expected to improve cooperative relationships to make it easier and more helpful in the BUMDES development process.

Keywords: *Accountability, BUMDES Financial Management*

PENDAHULUAN

Kemajuan suatu negara sangat ditunjang dengan pembangunan di sektor infrastruktur, baik diperkotaan maupun di pedesaan. Salah satu program pemerintah dalam aspek pembangunan yang sedang dijalankan adalah pembangunan di setiap daerah, terkhususnya pedesaan. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, “desa merupakan daerah otonom dan berhak untuk mengatur dan mengolah daerahnya sendiri”. Pemerintah membuat kebijakan untuk mengatur dan memudahkan desa guna memperoleh pendapatan asli desa, salah satunya dengan merintis Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang menjelaskan bahwa “pemerintah desa dianjurkan untuk memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang

* Korespondensi Penulis. E-mail: rahmawt1099@gmail.com

berguna untuk mengatur perekonomian desa dan memenuhi kebutuhan serta menggali potensi desa”.

Daerah/Desa dalam melaksanakan hak, kewenangan serta kewajibannya dalam mengelola kemampuan dan potensi yang dimiliki dituntut untuk dilakukan secara transparansi dan memiliki akuntabilitas yang tinggi. Menurut Waluyo dalam Astuty dan Farida (2013) akuntabilitas meliputi pemberian informasi keuangan kepada masyarakat dan pengguna lainnya sehingga memungkinkan bagi mereka untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah atas semua aktivitas yang dilakukan, bukan hanya laporan keuangan saja namun harus memberikan informasi dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik. Selain itu akuntabilitas adalah upaya negara dalam hal ini yaitu pemerintah dalam menciptakan penyelenggaraan pemerintah kearah yang lebih baik dengan berlandaskan *good governance*. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 87 menyebutkan (ayat 1) Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa; (ayat 2) BUMDes dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan; dan (ayat 3) BUMDesa dapat menjalankan usaha dibidang ekonomi atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kata “dapat” dalam undang-undang tersebut mengandung pengertian bahwa Desa diberi kesempatan, hak dan kewenangan untuk mendirikan BUM Desa. Oleh karena itu, pendirian BUMDes hendaknya dipahami sebagai peluang baru bagi Desa untuk mengembangkan perekonomian Desa melalui pendayagunaan potensi Desa untuk memenuhi kebutuhan warga Desa. Dengan kata lain, unit usaha yang akan dijalankan BUMDes hendaknya bertumpu pada potensi dan kebutuhan desa. Pendirian BUMDes merupakan inisiatif desa, bukan perintah dari pemerintah supra desa, sehingga pengelolaannya harus berdasarkan prinsip kemandirian desa dan semangat kekeluargaan serta kegotongroyongan.

Pendirian BUMDes antara lain dimaksudkan untuk mengurangi peran para tengkulak uang seringkali menyebabkan meningkatkan biaya transaksi antara harga produk dari produsen kepada konsumen akhir. Melalui lembaga ini diharapkan setiap produsen di pedesaan dapat menikmati selisih harga jual produk dengan biaya produksi yang layak dan konsumen tidak harus menanggung harga pembelian yang mahal. BUMDes dapat menjadi distributor utama untuk memenuhi kebutuhan Sembilan bahan pokok. Selain itu, BUMDes berfungsi menumbuh-suburkan kegiatan pelaku ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial dan sekaligus lembaga komersial. BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan BUMDes sebagai lembaga perekonomian desa hendaknya diselenggarakan dan dikelola secara professional, kreatif, inovatif, dan mandiri dalam berbagai usaha/bisnis yang dijalankannya.

Desa Sinaulu jaya merupakan desa yang memiliki potensi pertanian yang cukup baik selain itu besarnya kegiatan ekonomi masyarakat yang disebabkan mayoritas penduduk merupakan pedagang membuat arus perekonomian di desa tersebut cukup besar. Untuk mengembangkan perekonomian tersebut diperlukan badan usaha yang dapat mengelola sumber daya yang ada. Potensi yang dimiliki BUMDes sebagai lembaga usaha mandiri masyarakat desa dalam memberikan kesejahteraan masyarakat desa sendiri, agar rakyat pedesaan dapat mengembangkan potensi, sehingga tidak dirugikan dan lebih diuntungkan, maka diperlukan arus balik dalam pemerataan sumber daya alam dan kebijakan. Salah satu BUMDes yang didirikan dengan tujuan sebagai penopang atau penguat ekonomi desa adalah BUMDes Tanjung Sinaulu. BUMDes Tanjung Sinaulu bergerak dibidang usaha jasa simpan pinjam yang dapat membantu para pedagang dalam mengembangkan usahanya. Selain itu BUMDes Tanjung Sinaulu baru-baru ini bergerak di bidang usaha penyewaan moleng,

penyewaan papan dan transportasi. BUMDes tersebut sudah bergerak sejak Tahun 2017 sampe sekrang.

Tabel 1. Penggunaan anggaran BUMDes Tanjung Sinaulu desa Sinaulu Jaya

Tahun	Penyertaan modal desa (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi	Selisih	Partisipasi masyarakat
2018	50.000.000	108.000.000	108.000.000		
2019	50.000.0000	50.000.000	45.000.000	5.000.000	
2020	40.000.000	40.000.000	40.000.000		

(Sumber : Diolah dari laporan keuangan BUMDes desa Sinaulu Jaya)

Hasil penelitian sebelumnya Dewi Sartika (2018) tentang “Akuntabilitas dan Transparansi Alokasi Dana Desa Pada Nagari Labuah Gunuang” hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk perencanaan dan pelaksanaan kegiatan ADD sudah memperlihatkan pengelolaan yang akuntabel, dan berdasarkan laporan pertanggung jawaban dilihat secara hasil fisik juga sudah menunjukkan pelaksanaan yang akuntabel, namun masi perlu adanya pelatihan dan bimbingan teknis kepada aparatur negeri khususnya bendahara agar bisa menyusun laporan kekayaan milik nagari. Dan tindakan yang dilakukan oleh aparatur menurut peneliti belum memenuhi salah satu bentuk transparansi yaitu kemudahan mengakses data oleh masyarakat. Tujuan berdasarkan uraian rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini yaitu: untuk mengetahui akuntabilitas yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik desa di Desa Sinaulu Jaya pada tahap perencanaan dan akuntabilitas yang di lakukan oleh Badan Usaha Milik Desa di Desa Sinaulu Jaya pada tahap pelaksanaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode penelitian deskriptif. Lokasi penelitian ini berada di Desa Sinaulu Jaya Kecamatan Wawonii Tenggara Kabupaten Konawe Kepulauan. Lokasi penelitian digunakan untuk mendapat data, informasi, keterangan, dan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan penelitian sekaligus sebagai tempat dilaksanakannya penelitian. Waktu penelitian dilaksanakan tanggal 5 november 2021. Fokus Penelitian Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa Di Desa Sinaulu Jaya Kecamatan Wawonii Tenggara Kabupaten Konawe Kepulauan : perencanaan dan pelaksanaan. Sumber data yang diperoleh yakni data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yakni observasi, wawancara dan studi dokumen

Dalam penelitian ini, peneliti tidak hanya berfungsi sebagai observer, akan tetapi peneliti disini berfungsi sebagai partisipan penuh. Dimana peneliti ikut terlibat langsung dalam aktivitas yang sedang dilakukan oleh subyek selama penelitian. Selama penelitian berlangsung, informan mengetahui akan keberadaan peneliti yang sekaligus menjadi partisipan penuh. Sehingga, peneliti dapat langsung mengamati serta menganalisis akuntabilitas pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. Teknik analisis dalam penelitian ini akan menggunakan metode analisis interaktif seperti yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman dalam Sugiyono (1992:33-343). Tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan tahap penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Akuntabilitas Perencanaan BUMDES

Program usaha simpan pinjam ini didasarkan pada kebutuhan masyarakat desa sinaulu jaya yang kebanyakan para petani, nelayan dan pedagang. Selain itu penentuan program dalam musyawarah desa dihadiri oleh pemerintah setempat dan masyarakat. Tingkat kehadiran masyarakat desa sinaulu jaya pada forum musyawarah desa perencanaan BUMDES.

Tabel 2. Tingkat kehadiran masyarakat desa sinaulu jaya pada forum musyawarah desa perencanaan BUMDES

No	Jabatan/Instansi	Jumlah Undangan	Jumlah Hadir
1	Kepala Desa	1	1
2	BPD	5	3
3	Kelembagaan Desa	7	5
4	Masyarakat	40	10
	Jumlah	53	19

(Sumber : Diolah dari laporan keuangan BUMDes desa Sinaulu Jaya)

Tabel 3. Perencanaan anggaran penggunaan dana Bumdes Di Desa Sinaulu Jaya

Program	Rencana anggaran		
	Uraian	Jumlah satuan	Jumlah anggaran(Rp)
Simpan pinjam	Pinjaman modal usaha	111 orang	Rp.108.000.000
	Jumlah	111	Rp.108.000.000

(Sumber : Diolah dari laporan keuangan BUMDes desa Sinaulu Jaya)

Tabel 3. Kesesuaian pendirian/perencanaan pengelolaan BUMDES menurut peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi RI Nomor 4 tahun 2015.

Indikator	Hasil temuan	Keterangan (S = Sesuai, TS = tidak sesuai, BT = Belum Terjadi)
Perencanaan BUMDES disampaikan secara terbuka melalui musyawarah desa	Perencanaan BUMDES telah disampaikan secara terbuka melalui musyawarah desa	S
Perencanaan BUMDES dengan kondisi ekonomi desa dan potensi desa	Perencanaan BUMDES telah sesuai dengan kondisi ekonomi desa dan potensi desa dengan berpatokan pada mata pencaharian masyarakat	S
Hasil kesepakatan musyawarah desa menjadi pedoman untuk menerapkan peraturan desa tentang pendirian BUMDES	Hasil kesepakatan telah dijadikan pedoman dalam peraturan desa nomor 03 tahun 2017 tentang pembentukan dan pengelolaan BUMDES Tanjung Sinaulu dan beserta anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUMDES	S

(Sumber : Diolah dari laporan keuangan BUMDes desa Sinaulu Jaya)

B. Akuntabilitas Pelaksanaan Bumdes

Bumdes dalam pelaksanaannya menjalankan unit usaha simpan pinjam. Unit tersebut ditentukan berdasarkan potensi masyarakat yang dilihat dari mata pencaharian masyarakat setempat. Berikut realisasi penggunaan anggaran kegiatan program usaha Bumdes Tanjung Sinaulu di Desa Sinaulu Jaya. Perbandingan rencana anggaran dan realisasi penggunaan dana bumdes di desa sinaulu jaya tahun 2018.

Tabel 4. Perbandingan rencana anggaran dan realisasi penggunaan dana bumdes di desa sinaulu jaya tahun 2018

Program	Rencana Anggaran		Realisasi Anggaran		Selisih
	Uraian	Jumlah (Rp)(jutaan)	Capaian	Jumlah (Rp) (Jutaan)	
Simpan pinjam	Pinjaman modal usaha	108	Terlaksana	108	-
Jumlah		108		108	

(Sumber : Diolah dari laporan keuangan BUMDes desa Sinaulu Jaya)

Tabel 5. Perhitungan Pinjaman Masyarakat

No	Nama	Tgl/Bulan Pengambila n	Jumlah Pengambila n	Bunga Perbulan	Lama Pinjaman	Tgl Pengembalian	Jumlah
1	Marlan	07/01/2018	2.000.000	40.000	4 bulan	09/05/2018	2.160.000
2	Nasrun	07/01/2018	2.000.000	40.000	4 bulan	09/05/2018	2.160.000
3	Lakadi	07/01/2018	500.000	10.000	4 bulan	09/05/2018	540.000
4	Basima	07/01/2018	1.000.000	20.000	4 bulan	09/05/2018	1.080.000
5	Aliadin	07/01/2018	500.000	10.000	4 bulan	09/05/2018	540.000
6	Larangka	07/01/2018	500.000	10.000	4 bulan	09/05/2018	540.000
7	Lameda	07/01/2018	2.500.000	50.000	4 bulan	09/05/2018	2.700.000
8	Jusman	07/01/2018	500.000	10.000	4 bulan	09/05/2018	540.000
9	Dendi	07/01/2018	1.000.000	20.000	4 bulan	09/05/2018	1.080.000
10	Isdan	07/01/2018	500.000	10.000	4 bulan	09/05/2018	540.000
11	Wawan	07/01/2018	1.000.000	20.000	4 bulan	09/05/2018	1.080.000
12	Bahari	07/01/2018	500.000	10.000	4 bulan	09/05/2018	540.000
13	Lahendi	07/01/2018	1.000.000	20.000	4 bulan	09/05/2018	1.080.000
14	Laoku	07/01/2018	500.000	10.000	4 bulan	09/05/2018	540.000
15	Latand	07/01/2018	1.000.000	20.000	4 bulan	09/05/2018	1.080.000

a

(sumber : diolah dari bumdes tanjung sinaulu tahun 2018)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan BUMDes Tanjung Sinaulu Desa Sinaulu Jaya memberikan pinjaman rata-rata sebesar Rp 1.000.000 kepada masyarakat dengan jangka pinjaman 4 bulan dengan bunga 2 %.

Tabel 6. Kesesuaian Pelaksanaan Operasional Dengan Anggaran Rumah Tangga Bumdes Tanjung Sinaulu

Indikator	Hasil Temuan	Keterangan (S = Sesuai, TS = tidak sesuai, BT = belum terjadi)
Ketua BUMDES		
Memimpin organisasi melakukan pengendalian kegiatan	Ketua melakukan pengecekan dan menentukan kegiatan yang perlu direalisasikan	S
Bertindak atas nama lembaga untuk mengadakan perjanjian kerja sama dengan pihak ke tiga dalam pengembangan usaha atau lain-lain kegiatan yang dipandang perlu dilaksanakan	Perjanjian kerja sama belum dilakukan karena belum mendapat rekan kerja sama yang baik	BT
Melaporkan keadaan keuangan setiap bulan kepada komisaris dan pengawas	Pencatatan tiap bulan ada. Namun pelaporan tidak selalu disampaikan setiap bulan	TS
Melaporkan keadaan keuangan setiap triwulan melalui musdes	Pelaporan keadaan keuangan hanya dilaporkan akhir periode tiap akhir tahun melalui musdes	S
Melaporkan keadaan keuangan akhir tahun melalui musdes pertanggung jawaban	Keadaan keuangan selalu dilaporkan tiap akhir periode BUMDES	S
Sekretaris BUMDES		
Melaksanakan administrasi umum kegiatan operasional BUMDES	Administrasi umum telah dilakukan oleh sekretaris dengan mempersiapkan dokumen program kerja dan membantu dalam penyusunan laporan keuangan	S
Bersama ketua dan bendahara membahas memutuskan permohonan pinjaman yang layak direalisasi	Pembahasan penentuan pinjaman masyarakat telah dilakukan bersama dengan pengurus lainnya	S
Bendahara BUMDES		

Indikator	Hasil Temuan	Keterangan (S = Sesuai, TS = tidak sesuai, BT = belum terjadi)
Menerima, penyimpan dan membayar uang berdasarkan bukti-bukti yang sah	Setiap pemberian pinjaman, masyarakat diberikan kwitansi peminjaman yang digunakan sebagai bukti peminjaman. Dan stiap penerimaan dan pengeluaran selalu dicatat didalam buku kas umum dan buku bantu bumdes.	S
Membantu ketua dalam membahas dan memutuskan permohonan pinjaman yang layak direalisasikan (dalam hal simpan pinjam BUMDES)	Telah membantu ketua dalam memutuskan permohonan pinjaman masyarakat	S
Melaporkan posisi keuangan kepada ketua secara sistematis, dapat dipertanggungjawabkan dan menunjukkan kondisi keuangan dan kelayakan yang sesungguhnya	Pelaporan keuangan telah dilaporkan secara sistematis mengikuti modul pelatihan yang di berikan kabupaten	S
Mengeluarkan uang berdasarkan bukti-bukti yang sah	Pengeluaran uang dilakukan dengan melibatkan bukti kwitansi pembayaran	S
Mengelola keuangan organisasi	Laporan keuangan dibuat dalam bentuk laporan neraca, laba rugi dan perubahan modal mengikuti modul pelatihan BUMDES kabupaten	S

Dari tabel diatas, dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Ketua

Ketua memiliki tugas dan tanggung jawab dalam memimpin organisasi, melakukan pengendalian kegiatan, bertindak untuk mengadakan perjanjian kerja sama dengan pihak ke tiga dalam pengembangan usaha atau lain-lain kegiatan yang dipandang perlu dilaksanakan, dan melaporkan keadaan keuangan setiap bulan kepada komisariss dan pengawas, tiap akhir tahun melalui musdes.

Berdasarkan keterangan diatas bahwa seharusnya ketua melaporkan keadaan keuangan setiap bulan kepada pengawas, serta melaporkan keadaan keuangan setiap triwulan melalui musdes. Namun dari hasil pengamatan yang terjadi dilapangan, pelaporan keadaan keuangan hanya dilaporkan tiap akhir tahun melalui musdes. Berikut keterangan dari berbagai sumber yang telah didapat peneliti dari hasil wawancara Bapak BP sebagai pengawas BUMDES Tanjung Sinaulu :

“untuk pelaporannya bumdes itu, tidak dilaporkan tiap bulan, kalau untuk pelaporan musdes Cuma dilakukan 1 tahun sekali pada saat akhir periode”

Dari hasil keterangan diatas dan tidak adanya dokumen laporan triwulan BUMDES , maka dapat disimpulkan bahwa tugas dan tanggung jawab ketua dalam mengelola BUMDES belum terlaksana dengan baik.

b. Sekretaris

Sekretaris memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain : melaksanakan tugas kesekretarian untuk mendukung kegiatan organisasi, melaksanakan administrasi umum kegiatan operasional BUMDES, melaksanakan administrasi pembukuan keuangan BUMDES bersama ketua meneliti kebenaran dari berkas-berkas pengajuan permohonan pinjaman pengecekan dilapangan (dalam hal BUMDES simpan pinjam), bersama ketua dan bendahara membahas dan memutuskan permohonan pinjaman yang layak direalisasi.

Berdasarkan hasil observasi tugas kesekretarian yang dilaksanakan sekretrasi BUMDES Tanjung Sinaulu Desa Sinaulu Jaya direalisasikan dengan menyusun rencana kegiatan bumdes dan membantu mengelola admnisitrasi umum kegiatan operasional bumdes dengan membantu masyarakat dalam memperoleh surat keterangan usaha dn melakukan pengecekan permohonan pinjaman yang layak di realisasikan.

Hal ini ditegaskan oleh LM sebagai ketua BUMDES Tanjung Sinaulu , ia mengatakan :

“sekretaris bumdes telah melaksanakan tugasnya dengan baik , dengan membantu kami menyusun rencana program kemudian membantu dalam penyusunan laporan keuangan bumdes”

Dari hasil keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa tugas dan tanggung jawab sekretaris BUMDES telah dilaksanakan sebagaimana mestinya. Dengan melaksanakan tugas kesekretarian untuk mendukung kegiatan organisasi , melaksanakan administrasi umum kegiatan BUMDES bersama ketua meneliti kebenaran dari berkas-berkas pengajuan permohonan pinjaman pengecekan dilapangan (dalam hal Bumdes simpan pinjam) , bersama ketua dan bendahara membahas dan memtuskan permohonan pinjaman yang layak direalisasi.

c. Bendahara

Bendahara memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain : menerima, penyimpanan dan membayar uang berdasarkan bukti –bukti yang sah, membantu ketua dalam membahas dan memtuskan permohonan pinjaman yang layak direalisasikan (dalam hal simpan pinjam BUMDES), melaporkan posisi keeuangan kepada ketua secara sistematis, dapat dipertanggungjawabkan dan menunjukkan kondisi keuangan dan kelayakan yang sesungguhnya, mengeluarkan uang berdasarkan bukti-bukti yang sah mengelola keuangan organisasi.

Tabel 7. Buku Kas Umum BUMDES Tanjung Sinaulu

TGL	No bukti	Uraian transaksi	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Biaya operasional (Rp)	Saldo (Rp)
		Saldo Awal 2018				20.001.000
01/01/18	01/BKK/01/18	Belanja puling dynamo listrik		1.000.000	1.000.000	19.001.000
01/02/18	02/BKK/02/18	Belanja		14.000.000	14.000.000	5.001.000

Jurnal Online Program Studi Pendidikan Ekonomi, 8(2) (2023): 295-306
 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Di Desa Sinaulu
 Jaya

TGL	No bukti	Uraian transaksi	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Biaya operasional (Rp)	Saldo (Rp)
1/18	1/18	dynamo dan molen		00		0
02/01/18	03/BKK/01/18	Bayar biaya BIMTEK Bumdes		1.000.000	1.000.000	4.001.000
01/02/18	01/BKM/01/18	Terima tunai dana penyertaan moda dari bendahara desa siaulu jaya	50.000.000	0		54.001.000
06/01/18	04/BKK/02/18	Setor tunai dana penyaluran kredit SPP tahun 2018 tahap 1		54.000.000		1.000
10/05/18	02/BKM/05/18	Terima penyetora angsuran kredit SPP	58.280.000	0		58.281.000
10/05/18	05/BKK/05/18	Bayar biaya intensif pengurus		2.140.000	2.140.000	56.141.000
10/05/18	06/BKK/05/18	Setor PAD Desa		2.140.000	2.140.000	54.001.000
14/05/18	07/BKK/05/18	Setor tunai dana penyaluran kredit SPP tahun 2018 tahap II		54.000.000		1.000
15/09/18	03/BKM/09/18	Terima penyetoran angsuran kredit SPP	59.400.000	0		59.401.000
15/09/18	08/BKK/09/18	Bayar biaya intensif pengurus		2.200.000	2.200.000	57.201.000
15/09/18	09/BKK/09/18	Setor PAD Desa		2.200.000	2.200.000	55.001.000
15/09/18	10/BKK/09/18	Setor tunai dana kredit SPP ke		48.750.000		6.251.000

TGL	No bukti	Uraian transaksi	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Biaya operasional (Rp)	Saldo (Rp)
		petugas distribusi				
30/1 2/18	04/BKM/1 2/18	Terima penyetoran angsuran kredit SPP	51.175.50 0			57.426.5 00
30/1 2/18	11/BKK/1 2/18	Bayar biaya intensif pengurus		1.210.00 0	1.210.000	56.216.5 00
30/1 2/18	12/BKK/1 2/18	Setor PAD Desa		1.215.50 0	1.215.500	55.001.0 00

(Sumber : Diolah dari laporan keuangan BUMDes desa Sinaulu Jaya)

Berdasarkan data, pelaksanaan bumdes Tanjung Sinaulu desa Sinaulu Jaya masih perlu mengalami perbaikan karena masih memiliki ketidaksesuaian dengan aturan anggaran rumah tangga. Sebagaimana di jelaskan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi RI Nomor 4 Tahun 2015 menerangkan bahwa pelaksana operasional mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan dari hasil penelitian pada pembahasan yang telah dilakukan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan mengenai Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Sinaulu Jaya Kecamatan Wawonii Tenggara Kabupaten Konawe Kepulauan, bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan BUMDES sudah akuntabel, dari dua tahapan yang dilakukan yaitu tahap perencanaan dan tahap pelaksanaan. Tahap perencanaan dan tahap pelaksanaan sudah akuntabel. Saran di beriakn diantaranya: (1) Penyebaran informasi yang diberikan bumdes diharapkan dapat lebih ditingkatkan dengan membuat beberapa papan informasi yang mudah diakses masyarakat agar dapat lebih memberikan manfaat kepada masyarakat. (2) Pemerintah desa dan pengurus BUMDES diharapkan meningkatkan hubungan kerjasama agar lebih mempermudah dan membantu dalam proses pengembangan BUMDES.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuty, dkk. 2013. Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) (Studi pada Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2011 di Desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun). *Jurnal. Universitas Negeri Surabaya*.
- Dura, J. (2016). Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa, dan Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Pada Desa Gubugklakah Kecamatan Puncokusumo Kabupaten Malang). *Jurnal jibeka*. Vol. 10 No. 1 hal. 26-32.
- Effrianto P, Yuliansyah., dan Putro, S.C. (Ed). 2016. *Kiat-Kiat Terhindar Dari Korupsi Pada Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta: Imprint Change Publication.

- Fdhil Azhar, 2017. “*Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Di Desa Uekuli Kecamatan Tojo Kabupaten Tojo Una-Una)*”. Dipublikasikan. Tesis. Program Studi Akuntansi. Universitas Hasanuddin Makassar. 2017
- Farid dan Siswanto. 2011. *Analisa laporan keuangan*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Halim, A, dan Kusufi. 2014. *TEORI, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik (Ed. Ke-2)*. Jakarta : Salemba Empat.
- Harahap dan Sofyan Syafri. 2010. *Analisa Kritis atas laporan Keuangan cell 11*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Kieso, et al. 2011. *Intermediate Accounting, (Jilid 1) Edisi Ke-12 Diterjemahkan oleh Emil Salim*, Jakarta: Erlangga.
- Kumorotomo, Wahyudi. 2013. *Akuntabilitas Birokrasi Public*. Yogyakarta. Pustaka pelajar.
- Lestari dan Sri. 2017. *Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi Kasus di Wilayah Kecamatan Banyudono.)* dipublikasikan. Tesis. Program Studi Akuntansi Syariah. Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- Mahmudi. 2017. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Mahsun, Mohamad. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik Edisi Pertama*. Yogyakarta: BPFE.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi daerah dan manajemen keuangan daerah*. Yogyakarta: Andi
- Moleong, L.J. 2000. *Metodologi Penelitian kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Rakhmat. 2018. *Administrasi dan Akuntabilitas Publik*. Yogyakarta : Andi.
- Rasul, Syahrudin. 2003. *Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran dalam Pesrpektif UU NO.17/2003 Tentang Desa (Studi di Desa Sribhawono Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur)*. Lampung: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung Bandar Lampung.
- Sanusi, D.P dan Djumlani, A. 2014. Implementasi Kebijakan alokasi dana desa (ADD) di Desa Balansiku Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan. Volume 2 Nomor 3, 2014.